



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
BARATPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP	: BKAD/35/IX/2024
Tgl Pembuatan	: 19 September 2024
Tgl Revisi	: 1 Agustus 2025
Tgl Efektif	: 20 Agustus 2025
Disahkan oleh	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  Drs. Salvador Pinto Pembina Utama Muda NIP. 19740715 199403 1 005
Nama SOP	Penyusunan KUA dan PPAS

Dasar Hukum

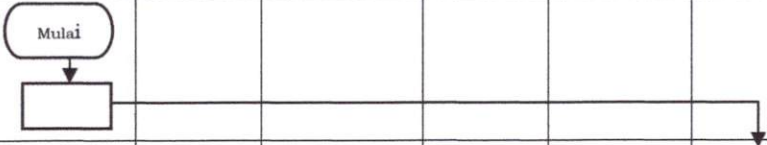
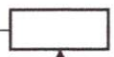
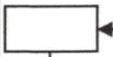
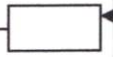
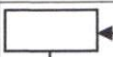
Kualifikasi Pelaksanaan

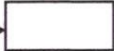
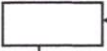
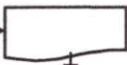
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tentang Standar Harga Satuan Regional
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

1. Pendidikan Minimal S1
2. Memiliki kewenangan menyusun dokumen APBD
3. Menguasai materi regulasi penyusunan APBD
4. Memiliki kemampuan operasional komputer
5. Memiliki kemampuan analisa data , penyusunan rencana dan program

9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 207); 10. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 60 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 Nomor 60); 11. Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun	
Keterkaitan 1. Penyusunan RKA Perangkat Daerah 2. SOP Penyusunan Standar Biaya Umum (SBU) 3. SOP Penyusunan KUA dan PPAS;	Peralatan dan Perlengkapan 1. Komputer PC set (+Printer) dan software 2. Aplikasi 3. Printer 4. ATK 5. Jaringan 6. Internet 7. Aplikasi SIPD
Peringatan 1. Penyusunan KUAPPAS merupakan bagian cukup penting yang memberi bagi penetapan plafon anggaran setiap Perangkat Daerah 2. Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal	Pencatatan dan Pendataan 1. KUA-PPAS 2. Nota Dinas 3. Surat Pengantar 4. Materi Pembahasan KUA-PPAS 5. Surat Edaran

Penyusunan KUA Dan PPAS

No	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			KET
		Bupati	DPRD	Sekretaris Daerah	TAPD	Inspektorat	BKAD	Bidang Anggaran	SKPD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5		6	7	10	11	12	13	14	15	
	Tahapan Penyusunan KUA-PPAS									Surat Arahan Penyusunan KUA-PPAS	1 Hari	Dokumen	
1	Penyusunan RKUA-PPAS dan diinput dalam SIPD-RI									RKA SKPD dan Aplikasi SIPD-RI	1 Minggu	Dokumen	
2	Verifikasi Penyusunan RKUA-PPAS di SIPD-RI									RKA SKPD dan Aplikasi SIPD-RI	1 Minggu	Dokumen	
3	Reviu RKUA-PPAS oleh APIP di SIPD-RI									RKA SKPD dan Aplikasi SIPD-RI	3 Hari	LHR	
4	Pemaparan RKUA dan RPPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah direviu oleh Inspektorat									RKA SKPD dan Aplikasi SIPD-RI	1 Hari	LHR	
5	Bidang Anggaran menyiapkan Dokumen RKUA Dan RPPAS untuk disampaikan ke DPRD dari SIPD-RI									Dokumen KUA-PPAS	3 Hari	Dokumen	
6	Penyampaian RKUA dan RPPAS oleh kepala daerah kepada DPRD									Dokumen KUA-PPAS	1 Hari	Dokumen	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			KET
		Bupati	DPRD	Sekretaris Daerah	TAPD	Inspektorat	BKAD	Bidang Anggaran	SKPD	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5		6	7	10	11	12	13	14	15	
7	Sekretariat DPRD menerima penyampain RKUA dan RPPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD									Dokumen KUA-PPAS	45 Menit	Dokumen	
8	Pembahasan RKUA dan RPPAS antara DPRD dan TAPD									Dokumen KUA-PPAS	1 Minggu	Dokumen	
9	Kesepakatan KUA-PPAS.									Dokumen KUA-PPAS	1 Hari	Dokumen	
10	Arsip									Dokumen KUA-PPAS dan Kesepakatan Bersama	1 Hari	Dokumen	
													